

**TAHUN
2022**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.01 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambi.prov.go.id

Email : balitbangdajambi1@gmail.com: balitbangdajbiup@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LkjiP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjiP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian LkjiP Tahun 2022 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 2022

Kepala Badan,



Pembina Utama Madya

NIP. 19660224 199203 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Nilai AKIP dengan anggaran sebesar Rp. 9.061.466.596,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.581.582.298,- (95,94%). Capaian kinerja Tahun 2022 dengan Nilai AKIP 70,27 dari 63 yang ditargetkan dengan Predikat BB.
2. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.314.983.370,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.224.011.134,- (96,07%). Capaian kinerja Tahun 2022 100% dari 60% yang ditargetkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Balitbangda Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan.
2. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai tahun berjalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
4. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi LkjiP dalam hal penyajian informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya
5. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjiP ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Balitbangda Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	14
1.4 Keadaan Pegawai.....	14
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	16
1.6 Keuangan	17
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	22
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	28
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	31
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	31
2.3.1 Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi.....	32
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	32
2.4 Instrumen Pendukung.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	33
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	34
3.3. Realisasi Anggaran.....	48
3.4. Analisis Efisiensi.....	55
BABIV PENUTUP	56
LAMPIRAN	58
Lampiran 1 Perjanjian KinerjaTahun 2022	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	
Lampiran 3 Penghargaan yang diraih Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	
Lampiran 4 Hasil Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022	
Lampiran 5 Hasil Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	
Lampiran 6 Matriks Renstra 2021-2026	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022	15
Tabel 1.2.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022.....	15
Tabel 1.3.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022	16
Tabel 1.4.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022.....	16
Tabel 1.5.	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	17
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi.....	26
Tabel 2.2.	Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi.	29
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	31
Tabel 2.4.	Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022	32
Tabel 2.5.	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Jambi	32
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	34
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022	34
Tabel 3.4.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022	35
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja 2020-2022	36
Tabel 3.6.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	47
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja 2020-2022	47
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	48
Tabel 3.9.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	51
Tabel 3.10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022.....	54
Tabel 3.11.	Analisis Efisiensi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	55

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi 2

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tujuan
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup

Pemerintah Provinsi Jambi.

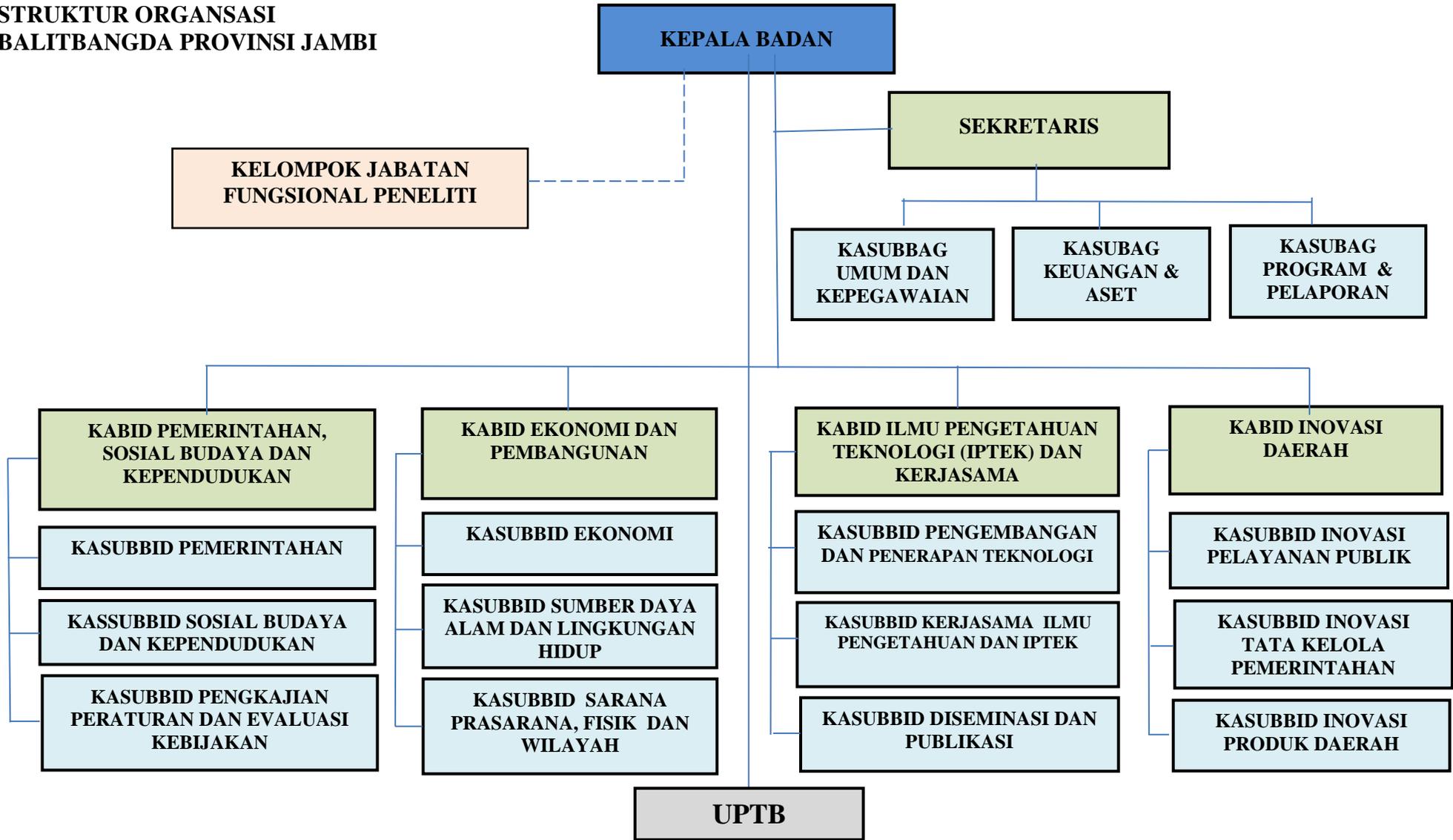
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya LKJIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi;
2. Mendorong Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Balitbangda Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANSASI
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 menggunakan struktur Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022.

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping tugas yang diemban tersebut Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 2) Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbang kab/kota;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada badan;
- 9) Pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
- 10) Permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- 11) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbangan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - penyiapan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;

- pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
 - penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
 - penyusunan laporan keuangan dan aset;
 - pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
- Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
 - pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
 - penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;

- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya;

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpendek, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Sosial Budaya dan Kependudukan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

➤ Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan evaluasi kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai fungsi :

- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

➤ Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Ekonomi ; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- Pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan Sumber Daya Genetik;
 - pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya .

➤ Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah, mempunyai tugas membantu budang dalam rangka melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang sarana prasarana fisik dan wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai fungsi :

- pengumpulan/pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi serta konsultasi di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- pelaksanaan bimbingan terhadap bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KERJASAMA

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang Iptek dan kerjasama;

- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;
- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbang berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbang di sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
 - penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbang serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pembinaan dan pelaksanaan kelitbang di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pelaksanaan kerjasama kelitbang serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbang;

- pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama Ilmu Pengetahuan Teknologi meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi iptek ,diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang Diseminasi dan publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pelaksanaan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi;
 - pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi ;
 - pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di sub bidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG INOVASI DAERAH

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu badan dalam rangka melaksanakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersilat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - pelaksanaan evaluasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode pengembangan Produk Daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - pelaksanaan fasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
 - penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
 - pelaksanaan pengawasan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Balitbangda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup OPD lingkun Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Kelitbang Kabupaten/Kota serta *stakeholder*. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah peraturan perundangan yang selalu berganti.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balitbangda Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian dan pengembangan belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan lptek.
3. Belum optimalnya pemanfaatan ekosistem inovasi sebagai budaya baru di kalangan Pemerintah, Masyarakat, Akademisi dan Pelaku Usaha dalam upaya peningkatan kinerja inovasi di daerah.
4. Belum optimalnya implementasi lptek bagi pembangunan di daerah.
5. Meningkatkan predikat Nilai SAKIP Balitbangda Provinsi Jambi menjadi "BB".

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi

kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2022.

. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022

NO.	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	3	1	4
3.	Eselon IV	1	2	3
JUMLAH		5	3	8

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1. di atas terlihat bahwa posisi Pejabat Struktural di Balitbangda Provinsi Jambi sudah lengkap serta proporsi Pejabat Struktural untuk Perempuan dan Laki-laki memiliki proporsi yang hampir sama banyak dan sudah mencerminkan keseimbangan gender.

Tabel 1.2. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2022

NO.	JENIS JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	STRUKTURAL	5	3	8
2.	JF PENELITI	3	2	5
3.	JF ARSIPARIS	0	1	1
4.	JF ANALIS DATA ILMIAH	0	1	1
5.	JF ANALIS KEBIJAKAN	5	3	8
6.	JF ANALIS PERENCANAAN	0	1	1
7.	JF UMUM	7	12	19
JUMLAH		20	23	43

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas terlihat masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Penambahan jabatan fungsional peneliti sangat diperlukan agar memberikan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi secara maksimal.

Tabel 1.3. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2022

NO.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	GOLONGAN I	0	0	0
2.	GOLONGAN II	1	1	2
3.	GOLONGAN III	11	18	29
4.	GOLONGAN IV	7	5	12
JUMLAH		19	24	43

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3. di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi Jambi paling banyak menduduki Golongan III, diikuti Golongan IV dan terakhir Golongan II. Dari total pegawai Balitbangda Provinsi Jambi jumlah Perempuan dan Laki-laki masih didominasi dengan pegawai Perempuan.

Tabel 1.4. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SLTA	1	2	3
2.	S1	6	13	19
3.	S2	11	7	18
4.	S3	1	2	3
JUMLAH		19	24	43

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan Tabel 1.4. di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi lebih banyak didominasi S1 dan S2 dan menyusul S3.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Balitbangda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.5. Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022**

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	-	-
2	Alat-alat angkutan	26 Unit	
	- Kendaraan Roda 4	10 Unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2	16 Unit	2 Rusak Berat
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.076 Jenis	20 Rusak Berat
4	Alat studio dan alat komunikasi	18 Jenis	1 Rusak Berat
5	Bangunan gedung	1 Unit	Baik
6	Jaringan	-	-
7	Buku perpustakaan	-	-
8	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber : Balitbangda Daerah Provinsi Jambi, 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2022 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Balitbangda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 11.857.430.503,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.287.443.299,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.569.987.204,-. Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 11.376.449.966,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.550.462.762,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.825.987.204,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan LKJIP Balitbada Provinsi Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, penjelasan umum perangkat daerah dengan penekanan pada aspek strategis organisasi seperti tugas dan sasaran sebagaimana penjabaran visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah dan Sistematisa penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, tabel perjanjian kinerja. Penjelasan apakah ada perbedaan antara target kinerja pada rencana tahun 2020 dengan yang diperjanjikan kinerjanya tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 berisi :

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019
- 2.4. Instrumen Pendukung

2.1. Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2022, Balitbangda Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 yang merupakan manifestasi komitmen Balitbangda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2021–2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi Pembangunan, yaitu ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT (MANTAP)”***

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerinth Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatkan iklim investasi, terujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupam di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitip dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Misi pertama, yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas yang mana sasaran adalah : a. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan b. Terwujudnya birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima.

Misi kedua, yaitu : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah dengan tujuan memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditi unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana sasaran strategis yang dilakukan adalah : a. memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan; b. meningkatkan industri pengolahan; c. meningkatkan peran sektor pariwisata serta IKM pendukung pariwisata; d. memantapkan kualitas pelayanan dasar dan insfrastruktur dasar; e. Meningkatkan kualitas lingkungan; f. Menurunnya tingkat pengangguran; dan g. Meningkatnya ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan.

Misi ketiga, yaitu : memantapkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya, agamis dan berkesetaraan gender yang mana sasaran strategis adalah : a. meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; b. meningkatnya akses terhadap pendidikan; c. meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya; d. meningkatnya toleransi intra dan antar agama; dan e. meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.

Dari Visi dan Misi Jambi MANTAP yang telah ditetapkan dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang, bertanggung jawab dalam pengkoordinasian proses penelitian dan pengembangan pembangunan daerah Provinsi Jambi, Balitbangda turut bertanggungjawab dalam mewujudkan ketiga misi pembangunan tersebut. Misi yang terkait dengan tupoksi Balitbangda Provinsi Jambi adalah Misi Kesatu yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan.

Disamping itu, eksistensi Balitbangda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya ketiga misi Gubernur.

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang baik tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya penelitian yang baik. Penelitian merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan. Inilah peran yang sangat strategis yang harus dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan seluruh pelaku pembangunan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 maka tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Jambi yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

Dalam Upaya mewujudkan Misi Kesatu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung e-governmant yang terintegrasi maka **Tujuan** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah maka ditetapkan Sasaran Strategis T_1S_1 : Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi; T_1S_2 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan; dan T_1S_3 : Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah.

Pencapaian sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program Blitbangda Provinsi Jambi 2021-2026. Indikator sasaran perlu ditetapkan agar pencapaian sasaran strategis dapat lebih terukur dan kebijakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut lebih terarah. Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	60%	65%	70%	75%	80%
				Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	30%	40%	45%	50%	50%
			Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk	Indeks Inovasi Daerah	59,50	60,00	60,50	61,00	61,50
				Persentase OPD kategori Inovatif dan Sangat Inovatif	30%	35%	40%	50%	50%

			Mendukung Daya Saing Daerah	Persentase teknologi yang dikembangkan atau diimplementasikan stakeholder	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Dokumen yang siap didaftarkan HKI-nya	80%	80%	80%	80%	80%
				Persentase Kerjasama yang terjalin	80%	80%	80%	80%	80%

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	<p>Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi</p> <p>Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan</p>	<p>Peningkatan Kuliatas Laporan Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi</p> <p>1. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi prioritas dan isu strategis</p> <p>2. Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas</p>	<p>Melakukan konsultasi dengan OPD pembina dan pengawas Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyusunan RIK</p> <p>2. Peningkatan dukungan anggaran penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan perbaikan kualitas dan kemanfaatan output litbang</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penelitian dan pengembangan</p> <p>4. Peningkatan kualitas dan sinergitas program penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kemanfaatan hasil</p> <p>5. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebaran kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan</p> <p>6. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (problem solving) melalui pemanfaatan hasil Litbang</p> <p>7. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik</p>
		Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	<p>1. Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>2. Fasilitasi penguatan penerapan teknologi</p>	<p>1. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Propinsi Jambi</p> <p>2. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA</p> <p>3. Penilaian pelaksanaan inovasi di OPD</p>

			<p>dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>3. Peningkatan sosialisasi dan fasilitasi ke masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya KI/invensi</p> <p>4. Pengembangan jejaring kemitraan antar institusi penelitian dan pengembangan</p>	<p>4. Fasilitasi dan pembinaan inovasi OPD secara sinergi dan terpadu</p> <p>5. Pemberian penghargaan dan penyediaan insentif bagi OPD inovatif</p> <p>6. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi</p> <p>7. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat</p> <p>8. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan intelektual</p> <p>9. Memfasilitasi masyarakat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual</p> <p>10. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya</p>
--	--	--	---	---

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumenten sebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Predikat
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60%

Sumber : Renstra Balitbangda Provinsi Jambi , 2022

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2022

Tahun Anggaran 2022 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2022 Balitbangda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 11.857.430.503,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.924.323.299,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.933.107.204,-. Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 11.376.449.966,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.295.342.762,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.081.107.204,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, meliputi 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan.

2.3.1. Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 11.376.449.966,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.295.342.762,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.081.107.204,-.

Tabel 2.4. Target Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Prosentase
1	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	7.295.342.762,-	64,13%
2	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan		
3	Belanja Langsung Non Keistimewaan	4.081.107.204,-	35,87 %
JUMLAH		11.376.449.966,-	100%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Rp. 1.511.003.834,-	39,49%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Rp. 2.314.983.370,-	60,51%	Program Penelitian dan Pengembangan
Jumlah		Rp. 3.825.987.204,-	100	

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 berisi :

3.1. *Capaian Kinerja Tahun 2022*

3.2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*

3.3. *Realisasi Anggaran*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Balitbangda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4.	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Prediket	BB (63)	BB (70,27)	111,54%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	%	60%	100%	166,87%	Sangat Baik

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

**Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Nilai BB	Balitbangda Provinsi Jambi	Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100% n-1	Balitbangda Provinsi Jambi	Laporan Akhir Kegiatan

Sumber : IKU Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Tahun 2022, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Balitbangda Provinsi Jambi mencapai target yang telah ditetapkan. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 : Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi dengan indikator kinerjanya, yaitu : Nilai AKIP.

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 terkait Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balitbangda Provinsi Jambi, terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi : 1. Perencanaan Kinerja; 2. Pengukuran Kinerja; 3. Pelaporan Kinerja; 4. Evaluasi Internal; dan 5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh nilai 70,27 yang menunjukkan dalam kategori **BB** atau **Sangat Baik**.

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	63 (B)	70,27 (BB)	111,54%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai AKIP	(BB Prediket) Nilai AKIP	61	71,01	116,41	62	70,18	113,19	63	70,27	111,54

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Sasaran #2 : Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Stakeholder.

Dengan perhitungan (Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan)/(Jumlah Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100% . Dengan asumsi n-1 (2021-1) yaitu hasil capaian di Tahun 2021, maka realisasi Capaian Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Tahun 2021 Balitbangda Provinsi Jambi melakukan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang-bidang, yaitu :

1. Produktivitas dan Efisiensi Perangkat Daerah Implementasi Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada 6 OPD Pemerintah Provinsi Jambi)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas dan efisiensi OPD pada Pemerintah Provinsi Jambi khususnya pada eselon 4 (empat) atau jabatan Administrator, kesesuaian jumlah pegawai dalam mewujudkan produktifitas dan efisiensi OPD serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas ASN eselon IV di Pemerintah Provinsi Jambi pada 6 (enam) OPD di Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Terdapat seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah memiliki jam kerja tidak produktif dan efisien, maka implikasi kebijakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 yang menyatakan apabila terdapat seksi yang memiliki jam kerja tidak produktif dengan ketentuan dibawah 700 jam atau 56%, maka seksi tersebut dapat digabungkan ke seksi yang memiliki unit kerja sejenis atau berdekatan fungsinya. Selain penggabungan cara lain yang dapat dilakukan Dinas atau Badan bersangkutan dapat menambah kembali program kerja seksi tersebut sehingga memiliki jam kerja diatas 700 jam atau 56%.

- Adanya ketidaksesuaian penempatan jumlah pegawai dengan beban kerja, maka implikasi kebijakannya adalah mengatur kembali penempatan jumlah pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja.
- Bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan serta Badan Keuangan Daerah yang memiliki beban kerja terlalu besar dengan tanggung jawab pengawasan yang besar maka implikasi kebijakan dinas atau badan tersebut dapat dilakukan restrukturisasi kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
- Bagi Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki struktur organisasi yang produktif dan efisien maka dinas tersebut dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah ditentukan. Namun Beberapa Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, memiliki kesamaan kegiatan dengan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan serta Tupoksi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Penelitian ini merupakan usulan dari Biro Organisasi, dari hasil penelitian di atas, rekomendasi sudah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Biro Organisasi sebagai pengusul. Rekomendasi hasil penelitian tersebut dijadikan pedoman oleh Biro Organisasi untuk melihat produktivitas dan efisiensi Perangkat Daerah.

2. Model Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada SMA/SMK Di Provinsi Jambi

Tujuan penelitian ini untuk menentukan kesiapan dari level siswa, guru dan kepala sekolah serta kesiapan sarana prasarana pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan merumuskan **model kesiapan satuan pendidikan pada level SLTA di Provinsi Jambi** dalam penyelenggaraan PTM pada era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan, beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Faktor kesiapan perilaku siswa dalam pencegahan dan penularan Covid-19 yang baik sebagai implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru di SLTA dalam Provinsi Jambi ditemukan sebagian besar (66,70%) siswa telah berperilaku yang baik. Adapun **model determinan perilaku siswa SLTA di Provinsi Jambi** dalam penerapan protokol kesehatan meliputi 4 faktor : (1) kemudahan pelaksanaan protokol kesehatan memberikan peluang sebesar 3,3 kali siswanya untuk melaksanakan protokol kesehatan; (2) kesiapan sekolah memberikan peluang 3,2 kali; (3) tingkat pengetahuan siswa 1,86 kali; (4) riwayat vaksinasi 1,84 kali; dan (5) kesiapan guru sebesar 1,69 kali.

- Faktor kesiapan pada kelompok guru dan kepala sekolah terkait penerapan AKB ditemukan bahwa guru dan kepala sekolah telah siap dalam mendukung keberhasilan penerapan protokol kesehatan. Perilaku guru dan kepala sekolah telah menunjukkan perilaku yang baik namun harus ditingkatkan pada kedisiplinan membawa peralatan kebutuhan pribadi, dan perilaku ketika telah sampai di rumah. Masa pandemi dirasa memberi dampak penambahan beban kerja guru baik dari sisi waktu, tenaga dan finansial dengan metode pembelajaran berbasis online. Selain itu, dirasakan terdapat hambatan dalam memberikan pemahaman dengan mudah kepada peserta didik.
- Faktor kesiapan sarana prasarana sekolah terkait pelaksanaan protokol kesehatan adalah sebagian besar sudah tersedia namun masih harus ditingkatkan terutama pada ketersediaan air bersih dan mengalir, masker cadangan, hand sanitiser, label jaga jarak baik di kelas/ruangan lain maupun di lingkungan sekolah serta data terkait kondisi kesehatan warga sekolah yang sebagian besar belum disiapkan oleh sekolah.
- Pemerintah Daerah perlu mendorong menciptakan **Digital Smart School** sebagai model pendidikan jarak jauh, dalam mengatasi dampak pembelajaran apabila terjadi pandemi kedepannya. Dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru Dinas Pendidikan perlu melakukan penguatan kelembagaan sekolah melalui pola kemitraan meliputi unsur kewilayahan (pemerintahan dan masyarakat), unsur PTN/PTS. Dinas Pendidikan harus mendorong Pihak sekolah untuk dapat melengkapi ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah serta lebih efektif dalam mengatur tata letak sarana prasarana tersebut sehingga lebih memudahkan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan.
- Pihak sekolah agar melaksanakan Standar Operasional Prosedure (SOP) sesuai standar pencegahan penularan Covid-19 yang telah ada seperti; SOP Masuk Lingkungan Sekolah, SOP KBM, SOP Pelayanan Perpustakaan, SOP Pelayanan Tata Usaha, SOP Keadaan Darurat, SOP Rapat. Selain itu Pihak sekolah agar lebih mendorong siswa untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam upaya peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi/simulasi terkait perkembangan terbaru Covid-19 yang dapat menjangkau tidak hanya warga satuan pendidikan disekolah namun juga masyarakat luas.

Penelitian ini dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi. Rekomendasi penelitian ini dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk jenjang SMA dan SMK sederajat dalam menghadapi pandemi Covid-19 selain itu juga dapat dijadikan sebagai pedoman jika terdapat pandemi selain Covid-19 di masa depan.

3. Keberlanjutan Kinerja UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi (*Perspektif Pola Pikir, Kemampuan dan Motivasi Pelaku Usaha UMKM*)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. menganalisis eksisting pola pikir, kemampuan, motivasi dan keberlanjutan kinerja UMKM di Provinsi Jambi; b. menganalisis pengaruh pola pikir dan kemampuan usaha terhadap keberlanjutan kinerja UMKM; c. menganalisis motivasi sebagai variabel mediasi; dan d. Menentukan strategi keberlanjutan UMKM di Provinsi Jambi.

- Beberapa UMKM belum menggunakan digitalisasi dan penjualan produk masih dengan cara konvensional, maka implikasi kebijakan untuk meningkatkan kompetensi digitalisasi diperlukan:
 - a. Program pelatihan dan pembinaan UMKM yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Kota dan Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindag, namun juga dilakukan oleh lembaga lain seperti Bank Indonesia dengan program unggulannya, Pertamina yang memiliki program UMKM setingkat lebih cerdas, Petro Cina yang memiliki program pemberdayaan UMKM, Indomaret melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi dan kreativitas dan Alfamart melakukan pelatihan tentang manajemen ritel dan bisnis ritel besar lainnya
 - b. Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di Provinsi, Kota dan Kabupaten membuat pola kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk memetakan program pemberdayaan sesuai dengan level dan kebutuhan UMKM sehingga menjadi program prioritas masing-masing *stakeholder* terkait untuk menghindari program yang sama dan adanya pemerataan program pemberdayaan untuk seluruh UMKM di Provinsi Jambi.
 - c. Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab atas data base UMKM yang dapat digunakan sebagai informasi bagi *stakeholder* terkait untuk keberlanjutan program pemberdayaan UMKM di Provinsi Jambi
- UMKM memiliki kemampuan belajar yang rendah, maka implikasi kebijakan UMKM membentuk asosiasi usaha antar UMKM tempat melakukan *sharing knowledge* dan saling belajar antar UMKM di bawah bimbingan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Perlu membangun motivasi UMKM untuk meningkatkan penjualan pada pandemi COVID-19, untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimbau *stakeholder* terkait dalam hal ini ritel dan pedagang besar sebagai mitra hilirisasi produk-produk UMKM, mengarahkan UMKM menghasilkan

produk sesuai dengan standar yang ditentukan mitra usaha atau pasar dan mengarahkan mitra mencari peluang pasar dengan melibatkan UMKM sebagai proses produksi.

- Bagi pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hendaknya menyediakan media informasi plat form digital produk-produk UMKM, yang digunakan sebagai sarana informasi, promosi dan pemasaran dan menghubungkan akses ke pasar yang lebih luas untuk lebih memperkenalkan produk-produk UMKM tersebut.
- Bagi Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/ Kabupaten/Kota hendaknya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung pemasaran berbasis online (*digital marketing*). Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar. Adapun materi pelatihan berupa :
 - a. Tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti *facebook, instagram, marketplace* dan sejenisnya.
 - b. Pengenalan dan implementasi *online mobilization mix* (bauran mobilisasi *online*) meliputi *share, hype, actionable, relevant* dan *emotional*. Bauran pemasaran ini sebagai respon adanya perubahan pasar. *Eraconnected society* adalah era dimana teknologi hadir dalam setiap aktivitas manusia dan merubah kehidupan manusia termasuk merubah pasar (perilaku konsumen).
 - c. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan *packaging* (kemasan produk). Kemampuan ini mutlak diperlukan sebagai wujud respon terhadap tuntutan pasar.
 - d. Pelatihan terkait *branding* produk. Selama ini kemampuan ini relatif terabaikan, karena ada kecenderungan pelaku UMKM lebih fokus dalam kegiatan produksi.
 - e. Pelatihan terkait *self motivation* (motivasi diri) dengan menghadirkan *coaching* atau motivator yang kompeten. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memompa dan merawat semangat pelaku UMKM serta siap menghadapi segala tantangan yang ada.

Penelitian ini juga dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi. Rekomendasi penelitian ini dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi maupun Kabupaten/Kota. Rekomendasi penelitian ini walaupun khusus untuk menghadapi masa pandemi Covid-19 namun rekomendasi ini dapat dijadikan acuan

bagi Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan bagi UMKM untuk Keberlanjutan Kinerja UMKM.

4. Kajian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jambi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan peretumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan asas kepatutan, asas keajaran dan asas rasionalitas. Berdasarkan hasil pembahasan maka rekomendasi dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- Besaran tunjangan perumahan dan transportasi dibayarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- Besaran tunjangan perumahan dan transportasi juga memperhatikan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

Penelitian ini merupakan usulan dari DPRD Provinsi Jambi, dari hasil penelitian di atas, rekomendasi sudah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi. Rekomendasi hasil penelitian tersebut dijadikan pedoman oleh DPRD Provinsi Jambi dalam penganggaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jambi.

5. Pengembangan Lebah Madu untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :a. menggambarkan kondisi eksisting usaha budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; b. mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; c. merumuskan alternatif strategi dalam pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; dan d. merumuskan model pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi.

Untuk mengembangkan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi memerlukan peranan beberapa pihak untuk melakukan pekerjaan sesuai kapasitasnya, antara lain:

Pemerintah daerah:

1. Meningkatkan anggaran untuk mendukung pengembangan budidaya lebah madu melalui program-program pengembangan pada sektor-sektor terkait budidaya lebah madu, mengingat potensi pendapatan daerah yang akan diberikan dari budidaya lebah madu.
2. Kebijakan dan anggaran pemerintah harus sinergi dengan kabupaten
3. Pemerintah ikut membantu pemasaran madu local dengan menyediakan stand pada event atau kegiatan pameran
4. Pemerintah ikut membantu bibit tanaman dalam menyediakan pakan lebah, seperti Dinas Perkebunan (bibit kopi, kayu manis, karet), Dinas kehutanan (sengon, kaliandra, ekaliptus, randu)

5. Pemerintah Daerah perlu mendukung program pemberdayaan dengan melakukan penguatan terhadap kegiatan yang sudah berjalan dan memperbaiki infrastruktur desa
6. Perlunya kajian lebih lanjut tentang penentuan lokasi yang direkomendasikan untuk budidaya lebah madu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kab/kota
7. Pemerintah bisa meminta kerjasama perusahaan untuk memberikan keleluasaan pada pembudidaya lebah madu dalam menanam tanaman sebagai sumber pakan lebah, dan meminta perusahaan untuk tidak melakukan penyemprotan insektisida pada lokasi tanaman yang telah diperbolehkan sebagai lokasi budidaya lebah madu.

Pemerintah Kabupaten/Desa :

1. Pengembangan budidaya lebah madu dapat dijadikan program prioritas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
2. Pendampingan kegiatan atau instansi terkait
3. Bumdes bisa dimanfaatkan untuk memasarkan madu
4. Pada saat musrenbangdes dapat diusulkan kegiatan perhutanan social
5. Pemerintah desa ikut mendukung pengembangan lebah madu dengan memperbaiki infrastruktur ataupun sarana dan prasarana desa dari dana desa.
6. Menginput data kegiatan budidaya lebah madu di desanya ke tingkat kabupaten melalui BPS

Kelompok Tani :

1. Kelompok tani perlu membudidayakan tanaman bahan pakan lebah madu
2. Menjaga kualitas dan keaslian madu dan diversifikasi produk
3. Kolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas pemasaran madu
4. Sebaiknya mengetahui kondisi/aturan penebangan akasia
5. Meningkatkan kemampuan kelompok tani, mendapatkan pelatihan atau transfer teknologi budidaya dan panen mulai dari pemeliharaan, memecah koloni, mengatasi serangan hama,
6. Diberikan kemudahan untuk mengakses modal untuk membeli peralatan, gula, bibit. Dengan adanya akses modal memudahkan petani menyediakan gula, terutama pada saat paceklik, dan juga kebutuhan untuk perluasan usaha dengan membeli/membuat stup menjadi permasalahan dana modal karena pengeluaran terbesar dalam budidaya dan pengadaannya tidak bisa ditunda.
7. Manajemen koloni. Populasi koloni sangat menentukan keberhasilan produksi madu, sebab saat ini permasalahannya banyak lokasi stup yang berjarak sangat dekat antara

grup koloni milik peternak satu dengan milik peternak lainnya. Sebaiknya ada jarak antara satu peternak dengan peternak lain dalam mengambil pakan lebah, sehingga tidak menyebabkan overlap.

Masyarakat di Sekitar Lokasi Budidaya :

1. Menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap
2. Menanam tanaman yang menjadi sumber pakan lebah pada lahan sendiri atau lahan terlantar
3. Bagi masyarakat yang berusahatani untuk tidak melakukan penyemprotan pestisida secara berlebihan agar lebah madu tidak terganggu.

Perusahaan PT. WKS:

1. Menjamin keberlangsungan produksi akasia sebagai pakan lebah madu
2. Komitmen dalam mengendalikan pemakaian pestisida dan bahan kimia
3. Mendukung kegiatan edukasi dan pelatihan kepada petani lebah madu di sekitar lahan.

Penelitian ini juga dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi. Rekomendasi penelitian ini dijadikan pedoman oleh Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun perusahaan yang berada di sekitar petani madu untuk dapat meningkatkan produksi madu lebah yang akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani madu.

6. Evaluasi Program Cetak Sawah Baru dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. mengevaluasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi; b. menganalisis dampak perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi; dan c. menganalisis status keberlanjutan program perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi.

Perluasan lahan dalam bentuk perluasan lahan khususnya di Provinsi Jambi menghadapi banyak kendala dan tantangan. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan petani dan *stakeholders* didapatkan hambatan sarana prasarana pendukung seperti jalan pertanian dan sarana irigasi yang tidak memadai dan alat mesin pertanian yang sangat terbatas.

Lembaga keuangan dan penyediaan sarana produksi seperti koperasi, toko sarana produksi dan peranan BULOG yang dinilai masih kurang. Kesuburan lahan yang masih kurang, kemampuan dan keterampilan petani dalam mengolah lahan yang ada tidak begitu baik karena sebagian besar petani terbiasa dengan pola usaha tani ladang dan perkebunan tidak terbiasa dengan pola usaha tani yang menetap seperti di sawah.

Selain hambatan tersebut, perluasan lahan pertanian di lokasi penelitian didukung oleh keberadaan kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan sarana tukar menukar informasi antar petani. Penyuluh pertanian yang selalu mendampingi dan melatih petani juga dinilai bermanfaat. Motivasi tinggi petani dalam mengelola lahan hasil perluasan lahan juga dinilai sangat bagus. Petani menilai perluasan lahan dapat meningkatkan penguasaan lahan sawah yang dikelola petani. Petani dan masyarakat juga merasakan dampak langsung tambahan luas lahan yang ada karena lahan perluasan lahan baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai penyerap tenaga kerja di pedesaan maupun sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan pendapatan.

Setelah melihat kondisi lapangan, wawancara dengan responden dan *stakeholders* terkait perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi, alternative kebijakan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha pertanian, pembangunan/rehabilitasi sarana jaringan irigasi tersier, Drainase pembuangan air dan irigasi sirkulasi pintu air dan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (mesin perontok padi, traktor bajak sawah, kendaraan roda tiga) yang dapat difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi/Kab/Kota.
2. Melakukan optimasi usahatani padi sawah melalui : a) peningkatan produktivitas dengan perbaikan varietas, perbaikan teknologi budidaya dan konservasi sumber daya lahan dan air; b) peningkatan indeks pertanaman padi sawah dengan membangun dan memperluas jangkauan jaringan irigasi serta memanfaatkan sumber daya air secara optimal; dan c) peningkatan efisiensi usahatani melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.
3. Menciptakan lapangan kerja baru baik *off farm* maupun *non farm* sebagai sumber pendapatan alternatif petani terutama pada tipologi lahan sawah setengah teknis dan pasang surut.
4. Memberikan insentif yang wajar kepada petani untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tukar petani melalui kebijakan subsidi sarana produksi, skim kredit usahatani bersubsidi yang mudah diakses, peningkatan harga gabah dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani.
5. Rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dibutuhkan peran penyuluh pertanian. Peran penyuluhan

antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan dan proses rekayasa sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran penyuluh pertanian dalam masyarakat pedesaan dengan cara peningkatan wawasan penyuluh pertanian dan keahliannya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluh pertanian.

Penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai jembatan bagi petani. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya produksi, modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang dibutuhkan petani agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran penyuluhan pertanian dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dan berkelanjutan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian.

6. Upaya untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menuju non pertanian, sejumlah strategi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alih fungsi lahan dengan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan harus ditetapkan dalam RTRW kabupaten (UU No. 41/2009, pasal 18-19), sedangkan penetapan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam rencana rinci/detail tata ruang (RDTR) kabupaten (UU No. 41/2009, pasal 20-21).
 - b. Membatasi luas lahan yang dapat dialihfungsikan melalui pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kawasan P2B) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) difokuskan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi yang harus dikembangkan di dalam Kawasan P2B dan LP2B meliputi : 1. peningkatan kesuburan tanah; 2. peningkatan kualitas bibit; 3. diversifikasi tanaman pangan; 4. pencegahan dan penanggulangan HPT; 5. pengembangan irigasi; 6. pemanfaatan teknologi pertanian; 7. pengembangan inovasi pertanian; 8. penyuluhan pertanian; 9. Jaminan akses permodalan. Sedangkan program ekstensifikasi meliputi kegiatan : 1. pencetakan LP2B; 2. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan 3. Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B.

Pengendalian LP2B. Aspek pengendalian dibagi atas 3 hal, yaitu insentif, disinsentif dan alih fungsi. Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kepada para petani yang lahannya masuk kategori LP2B, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian benih dan varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi, bantuan penerbitan sertifikat tanah, penghargaan bagi petani berprestasi dan keringanan pajak bumi dan bangunan.

Rekomendasi penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan program yang dicanangkan oleh pusat bagi daerah untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana maupun masyarakat/petani sebagai objek dari program tersebut sehingga program yang akan dilaksanakan dapat berhasil dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Kualitas Pelayanan Perizinan di Provinsi Jambi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. untuk mengetahui dan memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; b. harapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; c. kekuatan hubungan antar unsur pelayanan perizinan dan aspek-aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; dan d. upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Pelayanan perizinan membutuhkan sosialisasi yang intensif terutama sampai ke pelosok desa dan kelurahan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum mengurus izin karena ketidaktahuan. DPM-PTSP dapat bekerjasama dengan kepala desa dan kelurahan untuk kegiatan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi atau WEB pelayanan perizinan baik secara OSS maupun non OSS.
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan lebih memperhatikan memperhatikan kompetensi petugas pelayanan agar harapan masyarakat dapat dipenuhi oleh petugas.
- Membangun sistem integrasi dengan dinas-dinas teknis terkait untuk mempermudah masyarakat mengurus izin dengan cara membuat inovasi sistem pelayanan secara digital yang menghubungkan DPM-PTSP dengan dinas teknis terkait.
- Memperhatikan dan memperbaiki indikator pada kuadran pertama terkait dengan sistem pelayanan, proses pelayanan, kompetensi SDM yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang mengikat DPM-PTSP dan masyarakat pengguna.

Penelitian ini merupakan usulan dari Dinas PTSP Provinsi Jambi, dari hasil penelitian di atas, rekomendasi sudah disampaikan ke Bapak Gubernur Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan Dinas

PTSP Provinsi Jambi sebagai pengusul. Rekomendasi hasil penelitian tersebut dijadikan pedoman oleh PTSP Provinsi Jambi dalam memberikan pelayan perizinan bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kepuasan masyarakat.

Dari 7 (tujuh) penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021, rekomendasi hasil penelitian tersebut sudah disampaikan ke Bapak Gubernur, DPRD Provinsi Jambi dan OPD terkait atau yang mengusulkan. Dari 7 (tujuh) penelitian tersebut semua rekomendasi hasil penelitian menjadi pedoman bagi OPD dalam melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan tupoksi OPD sehingga program dan kegiatan dapat berhasil dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60%	100%	166,67%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Target		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	Persentase	50%	12,5%	25%	50%	100%	200%	60%	100%	166,67%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. . Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2022	Capaian s/d 2022 terhadap target 2022 (%)
			2022	2023	2024		
1.	Nilai AKIP	B (62)	BB (70,27)			63	111,54%
2.	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	50%	100%			60%	166,67%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya, belum terdapat standar nasional untuk kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang disusun oleh Kementerian maupun Instansi Vertikal pada bidang kelitbangan, sehingga realisasi capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

3.2. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Tahun 2022 Dana APBD sebesar Rp. 11.376.449.966,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung Rp. 7.295.342.762,-
- Belanja Langsung Rp. 4.081.107.204,-
- Belanja Barang/Jasa Rp. 4.059.584.204,-
- Belanja Modal Rp. 21.523.000,-

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.909.287.273,- (95,74%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 2.224.011.134,- (96,07%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 8.581.582.298 (94,70%).

Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022, Penyerapan belanja sebesar Rp. 10.805.593.432,- atau 94,98% dengan sisa anggaran Rp. 570.856.534,- (5,02%). Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung Rp. 6.898.306.158,- (94,56%)
- Belanja Langsung Rp. 3.909.287.273,- (95,74%)

Anggaran dan realisasi belanja langsung yang dikelola Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meliputi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 461.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 429.752.217,- (93,04%). Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP.
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Jumlah anggaran sebesar Rp. 19.509.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.424.292,- (84,19%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap dalam pencapaian Nilai AKIP.
3. Kegiatan Administrasi Umum
Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 386.703.764,- dengan realisasi sebesar Rp. 384.848.614,- (99,52%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Nilai AKIP.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik serta Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 380.872.270,- dengan realisasi sebesar Rp. 368.030.160,- (96,63%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Nilai AKIP.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp. 517.118.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 484.220.857,- (93,64%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Nilai AKIP.

b. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Meliputi Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan dan Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan pengembangan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Jumlah anggaran sebesar Rp. 468.218.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 447.923.875,- (93,64%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial. Jumlah anggaran sebesar Rp. 128.984.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.561.880,- (98,12%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Meliputi Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, Sub Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Pangan serta Sub Kegiatan dan Penelitian Perhubungan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 720.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 690.158.248,- (95,86%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Meliputi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan serta Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah anggaran sebesar Rp.997.780.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 959.367.131,- (96,15%).

**Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO	OPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %	
					Rp.	%		
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah								
BELANJA LANGSUNG		11.857.430.503,00	11.376.449.966,00	11.376.449.966,00	10.805.775.432,00	94,98	100,00	570.674.534,00
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		466.000.000,00	461.920.000	461.920.000,00	429.752.217,00	93,04	100,00	32.167.783,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376.000.000,00	371.920.000	371.920.000	349.345.515,00	93,93	100,00	22.574.485,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	9.899.945,00	99,00	100,00	100.055,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	9.892.810,00	98,93	100,00	107.190,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.000.000,00	70.000.000	70.000.000	60.613.947,00	86,59	100,00	9.386.053,00
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.924.323.299,00	7.295.342.762	7.295.342.762	6.898.306.158,00	94,56	100,00	397.036.604,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.924.323.299,00	7.295.342.762	7.295.342.762	6.898.306.158,00	94,56	100,00	397.036.604,00
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24.139.000,00	19.509.000	19.509.000,00	16.424.292,00	84,19	100,00	3.084.708,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.139.000,00	19.509.000	19.509.000	16.424.292,00	84,19	100,00	3.084.708,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		391.221.753,00	386.703.764	386.703.764,00	384.848.614,00	99,52	100,00	1.855.150,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.473.400,00	7.473.400	7.473.400,00	7.445.000,00	99,62	100,00	28.400,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.673.746,00	72.957.234	72.957.234	72.897.877,00	99,92	100,00	59.357,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.992.000,00	21.992.000	21.992.000	21.968.500,00	99,89	100,00	23.500,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	30.420.000	30.420.000	30.385.785,00	99,89	100,00	34.215,00

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000	7.000.000,00	6.960.000,00	99,43	100,00	40.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.082.607,00	246.861.130	246.861.130	245.191.452,00	99,32	100,00	1.669.678,00
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		350.268.681,00	380.872.270	380.872.270,00	368.030.160,00	96,63	100,00	12.842.110,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.369.600,00	36.869.600	36.869.600	36.849.776,00	99,95	100,00	19.824,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000,00	147.943.960	147.943.960,00	135.369.815,00	91,50	100,00	12.574.145,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.899.081,00	196.058.710	196.058.710	195.810.569,00	99,87	100,00	248.141,00
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		517.118.800,00	517.118.800	517.118.800,00	484.220.857,00	93,64	100,00	32.897.943,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	384.488.800,00	384.488.800	384.488.800,00	353.743.757,00	92,00	100,00	30.745.043,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.490.000,00	24.490.000	24.490.000,00	24.489.300,00	100,00	100,00	700,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.140.000,00	108.140.000	108.140.000,00	105.987.800,00	98,01	100,00	2.152.200,00
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		469.358.970,00	468.218.970	468.218.970,00	447.923.875,00	95,67	100,00	20.295.095,00
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	240.467.770,00	240.467.770	240.467.770,00	229.911.293,00	95,61	100,00	10.556.477,00
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000,00	96.321.210,00	96,32	100,00	3.678.790,00
3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	128.891.200,00	127.751.200	127.751.200,00	121.691.372,00	95,26	100,00	6.059.828,00
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		140.000.000,00	128.984.400	128.984.400,00	126.561.880,00	98,12	100,00	2.422.520,00

1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	140.000.000,00	128.984.400	128.984.400,00	126.561.880,00	98,12	100,00	2.422.520,00
9 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		570.000.000,00	720.000.000	720.000.000,00	690.158.248,00	95,86	100,00	29.841.752,00
1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	290.000.000,00	290.000.000	290.000.000,00	282.283.392,00	97,34	100,00	7.716.608,00
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	140.000.000,00	290.000.000	290.000.000,00	272.775.120,00	94,06	100,00	17.224.880,00
3	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	140.000.000,00	140.000.000	140.000.000,00	135.099.736,00	96,50	100,00	4.900.264,00
10 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1.005.000.000,00	997.780.000	997.780.000,00	959.549.131,00	96,17	100,00	38.230.869,00
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	125.000.000,00	120.000.000	120.000.000,00	116.593.388,00	97,16	100,00	3.406.612,00
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	400.000.000,00	397.780.000	397.780.000,00	381.440.165,00	95,89	100,00	16.339.835,00
3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	265.000.000,00	265.000.000	265.000.000,00	255.744.306,00	96,51	100,00	9.255.694,00
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	140.000.000,00	140.000.000	140.000.000,00	132.757.080,00	94,83	100,00	7.242.920,00
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	75.000.000,00	75.000.000	75.000.000,00	73.014.192,00	97,35	100,00	1.985.808,00
JUMLAH BELANJA		11.857.430.503,00	11.376.449.966	11.376.449.966,00	10.805.775.432,00	94,98	100,00	570.674.534,00

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2022 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	63	70,27	111,54	9.061.466.596,-	8.581.582.298,-	95,94
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60	100	166,67	2.314.983.370,-	2.224.011.134,-	96,07
	Belanja langsung pendukung					0	0	0
	Belanja tidak langsung					7.295.342.762,-	6.898.306.158,-	94,56
	Jumlah belanja langsung					4.081.107.204,-	3.909.287.273,-	95,74
	Total Belanja					11.376.449.966,-	10.805.593.432,-	94,98

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

3.3. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Analisis Efisiensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)		
1.	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	63	70,27	111,54	95,94	4,06
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60	100	166,67	96,07	3,93
TOTAL						96,005	3,995

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2022

Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 3.11 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun serapan anggaran Tahun 2022 sebesar 96,005% atau terdapat efisiensi sebesar 3,995%. Efisiensi dimaksud merupakan penghematan atas penggunaan sarana dan prasana pada setiap kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Bab 4 berisi :

4.1. *Kesimpulan*

4.2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi”, dengan indikator Nilai AKIP, realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 111,54%.
2. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan”, dengan indikator Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*, realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar 166,67%.
3. Realisasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 dengan efisiensi anggaran sebesar 3,995%
4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti waktu pelaksanaan kegiatan penelitian yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian untuk survey awal dilaksanakan di bulan Februari sehingga untuk tahapan selanjutnya tidak akan molor dari jadwal yang telah dibuat.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Demikian LKJIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 2022
Kepala Badan,

Ir. AZRIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660224 199203 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. AZRIN, M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Provinsi Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **Dr. H. AL HARIS, S.Sos., MH.**
Jabatan : Gubernur Jambi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2022

Pihak Kedua,

Dr. H. AL HARIS, S.Sos., MH.

Pihak Pertama,

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	BB Predikat
2.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	60%

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.673.071.533,00	APBD
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.184.358.970,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	11.857.430.503,00	

GUBERNUR JAMBI,



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., MH.

Jambi, Januari 2022

**KEPALA BALITBANGDA,
PROVINSI JAMBI**



Ir. AZRIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196602241992031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI**

- OPD : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
- Dasar : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
- Tugas : Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi : 1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di Pemerintahan Provinsi;
2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Provinsi;
3. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Pemerintahan Provinsi;
4. pembinaan dan fasillitasi kelitbangan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;
5. pelaksanaan fasillitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di provinsi;
7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Provinsi;
8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Balitbangda;
9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
10. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di daerah;
11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi; dan
12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Nilai BB	Balitbangda Provinsi Jambi	Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100% n-1	Balitbangda Provinsi Jambi	Laporan Akhir Kegiatan

Jambi, Januari 2022
KEPALA BADAN,


Ir. AZRIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

Lampiran 3

Penghargaan yang diraih Balitbangda Tahun 2022

1. Lomba Inovasi Daerah antar OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

Untuk mendorong Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berbasis inovasi Balitbangda Provinsi Jambi melaksanakan Lomba Inovasi Daerah antar OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Dari hasil penilaian Tim Juri Lomba, Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh skor 62,17 dengan kategori Sangat Inovatif.



Lampiran 4.

Hasil Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan Tahun 2022

1. **KONSEP PERCEPATAN OPEN DEFECATION FREE DI PROVINSI JAMBI (KABUPATEN KERINCI, BUNGO DAN TANJUNG JABUNG BARAT)**

Penelitian dilakukan di tiga kabupaten dengan sampel 3 (tiga) desa yaitu Kabupaten Kerinci Desa Sungai Renah (akses jamban sehat 1,64%), Kabupaten Bungo Desa Renah Jelmu (akses jamban sehat 18,66%) dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Desa Rantau Benar (akses jamban sehat 10,47%) . Ketiga desa tersebut memiliki akses jamban masih dibawah 25%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku masih buang air besar sembarangan disebabkan faktor budaya yaitu desa sungai renah dengan tingkat kehidup ekonomi yang mendukung tapi memiliki perilaku lebih suka buang air besar disungai dan belum terbiasa BAB di WC karena ada perasaan tidak nyaman. Sementara desa Renah Jelmu dan Rantau Benar BABS terjadi karena factor ekonomi. Penduduk yang masih BABS karena tidak mampu membuat WC di rumah, selain itu utnuk desa Renah jelmu kasus yang ditemui beberapa penduduk yang punya WC tetap BABS kesungai dikarenakan kesulitan air bersih. Model pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan konsep percepatan open defecation free adalah melalui analisis model CIPP yaitu menilai indikator dari konteks, input, proses dan dampak (informasi diperoleh dari masyarakat, kader, kepala desa, petugas sanitarian dan fasilitator) dan pendekatan analisis stakeholder yang menilai peran dan kontribusi pemangku kepentingan untuk mewujudkan desa stop BABS dengan menilai kontribusi yang sudah dilakukan dan menilai sejauh mana pemangku kepentingan menganggap penting dan urgennya program Stop BABS dan berapa besar Kekuatan yang diberikan untuk program desa Open Defecation Free.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Penyusunan regulasi daerah dalam bentuk peraturan Gubernur, Walikota/Bupati, Kepala Desa/Datuk Rio tentang Desa ODF guna dijadikan pedoman warga desa melaksanakan program ODF.
- b. Dukungan dalam bentuk koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan pengendalian penduduk Provinsi Jambi kepada dinas pemberdayaan Desa di setiap Kabupaten untuk mendorong Pemerintah Desa perlu : a. Menganggarkan khusus kegiatan untuk Stop BABS, karena selama ini masih dianggap bukan program prioritas; b. Untuk membantu kekurangan petugas sanitarian, pemerintah desa perlu membentuk kader-kader desa; dan c. Dalam mempengaruhi masyarakat untuk stop BABS kepala desa perlu mengajak ketua adat atau lembaga adat sebagai role model desa.
- c. Dukungan dan pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Kepada Dinas Kesehatan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi untuk :

- a. Mendorong pemerintahan desa membentuk natural leader dari masyarakat sebagai agen perubahan perilaku untuk STOP BABS yang dilatih oleh dinas kesehatan dan fasilitator 6;
- b. Rekrutmen petugas outshourching sanitarian untuk satu desa satu sanitarian untuk mendorong konsep percepatan STOP BABS 0 % Tahun 2024; dan
- c. Mendorong pemerintahan desa memiliki kelengkapan data masyarakat desa yang tidak mampu membangun jamban sehat dan belum mampu mengakses air bersih by name by address guna memenuhi persyaratan menerima bantuan jamban sehat.
- d. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi bersama Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat dan PDAM perlu menyamakan persepsi tentang program Stop BABS, sehingga ada sinergisitas dalam melakukan dukungan Stop BABS di Kabupaten dan Kota untuk menerapkan Konsep Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Menuju 100% Desa ODF Tahun 2024 (menggambarkan strategi, arah kebijakan, focus kegiatan, keterlibatan stakeholder dan dukungan provinsi).
- e. Perlu Surat Keputusan Bupati untuk menunjuk keterlibatan stakeholder dalam mengimplementasikan konsep percepatan desa ODF.
- f. Program Desa ODF menjadi bagian pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten dan Provinsi sebagai aspirasi bahwa masyarakat yang masuk dalam skala prioritas untuk dibahas dalam RAPBD tahun berjalan

2. EFEKTIFITAS PENETAPAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBAGAI PANGKALAN GAS DI PROVINSI JAMBI

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang merupakan turunan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah status BUM Desa menjadi Badan Hukum. BUM Desa dengan berbagai bidang usahanya antara lain sebagai pangkalan gas akan menjadi salah satu solusi dalam masalah penyaluran gas 3 kg di daerah. Telah dilakukan penelitian yang berjudul Efektifitas Penetapan BUM Desa sebagai Pangkalan Gas di Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan, kendala yang dihadapi, strategi dan efektifitas penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas di Provinsi Jambi. Metode penelitian menggunakan mix methode dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan dan kendala dalam penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas, analisis SWOT untuk menemukan strategi penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas dan teori efektifitas untuk menentukan keefektifan penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan penyebaran kuisioner ke lima lokasi yang merupakan desa terpilih yang memiliki BUM Desa sebagai pangkalan gas di Provinsi

Jambi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) Provinsi Jambi.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Pemerintah Provinsi mengeluarkan surat dalam bentuk SK gubernur ataupun Surat Edaran agar Pemerintah kabupaten/Kota berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan distribusi LPG 3 Kg dan menyediakan anggaran untuk kegiatan tersebut.
- b. Pemerintah Prov. Jambi perlu meminta realisasi LPG 3 Kg bersubsidi yang telah disalurkan oleh PT. Pertamina kepada agen-agenya setiap trip dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pengecekan apakah kuota yang ditetapkan telah sesuai atau tidak.
- c. Pemerintah Provinsi Jambi membuat surat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat melaporkan setiap penyelewengan yang dilakukan oleh Agen dan Pangkalan secara tertulis dan meminta secara resmi kepada PT. Pertamina untuk dapat memberikan sanksi tegas sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 dan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- d. Perlu Pengawasan dari Pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam distribusi gas saat ini.
- e. Program penetapan BUM Desa sebagai pangkalan gas di perluas diseluruh Provinsi Jambi, satu Desa Satu BUM Desa pangkalan gas perlu dikaji dan dijadikan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi.

3. POTENSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN STRATEGI PENANGANANNYA DI PROVINSI JAMBI. (STUDI KASUS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DAN KABUPATEN SAROLANGUN)

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri sesuai dengan kondisi dan adat istiadat setempat. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengatur bahwa desa memiliki kedaulatan meskipun bersifat terbatas karena desa merupakan entitas yang mempunyai legitimasi dan recognisi dalam bentuk peraturan dan adat istiadat yang khas secara turun temurun. Namun dalam praktiknya, kedaulatan desa ini sering terhambat karena posisi kewenangan desa masih sering “dilangkahi” oleh unit pemerintahan yang lebih tinggi. Upaya yang dilakukan desa untuk melindungi Sumber Daya Alamnya seringkali kalah dengan kepentingan pemerintah daerah ataupun pusat yang memberikan ijin kepada sector-sektor yang ingin mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang berada di wilayah desa. Saat ini juga masih banyak wilayah desa yang belum memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga seringkali

menimbulkan sengketa antara desa dan instansi/individu yang melakukan aktivitas berdekatan dengan wilayah desa.

Rekomendasi Kebijakan :

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa permasalahan yang menjadi potensi timbulnya konflik adalah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, sengketa batas antardesa, kerusakan lingkungan oleh aktivitas perusahaan, Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, Tanah Kas Desa (TKD), Pengurus dan anggota koperasi dari luar desa, klaim tanah antarwarga dan perusahaan, dan tumpang tindih kepemilikan tanah warga antarwarga. Dan potensi konflik lainnya yang dapat terjadi adalah aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan aktifitas Illegal drilling.
- b. Terhadap kondisi diatas dapat direkomendasikan, agar Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten melalui OPD Terkait dalam hal ini Kesbangpol untuk menyusun skala prioritas penanganan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun agar prediksi konflik yang mungkin terjadi dapat diantisipasi sesegera mungkin dan tidak meluas. Beberapa skala prioritas yang dapat dilakukan adalah dengan cara; pertama memaksimalkan fungsi dan tugas Tim PPB (penetapan dan Penegasan Batas Desa) sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 untuk menyelesaikan masalah batas desa yang belum selesai dilakukan, kedua sesuai dengan amanat Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 agar gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa, ketiga memaksimalkan dan mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Propinsi Jambi yang sudah dibentuk agar melakukan langkah-langkah teararah dan terukur untuk menyelesaikan berbagai macam konflik Sumber Daya Alam (SDA).
- c. Berkaitan dengan upaya penanganan terhadap potensi konflik di atas ada yang belum ditangani sama sekali dan ada yang sudah ditangani tetapi belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan yang belum ditangani dapat menjadi konflik yang lebih besar dan Ringkasan Eksekutif: Potensi Konflik Sumber Daya Alam (Sda) Dan Strategi Penanganannya Di Provinsi Jambi. (Studi Kasus Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dan Kabupaten Sarolangun) 10 Halaman | 10 meluas. Dalam penanganan konflik belum mengoptimalkan fungsi dan tugas Tim PPB (penetapan dan Penegasan Batas Desa), belum memberdayakan lembaga adat setempat karena belum semua desa membentuk Lembaga Adat Desa (LAD), dan belum optimalnya kerja Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial hal ini menunjukkan belum terjalin sinergi yang kuat antara elemen kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan potensi konflik yang terjadi.

d. Terhadap kondisi diatas dapat direkomendasikan agar dalam penanganan konflik diupayakan melibatkan secara masif lembaga adat di masing-masing daerah dan desa, serta dilakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara periodik dan berkesinambungan, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 10 Ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa salah satu fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) adalah mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian berbagai macam sengketa termasuk sengketa tanah dan konflik dalam interaksi manusia. Salah satu model penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

4. EFEKTIFITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) BANTUAN BARANG BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI PROVINSI JAMBI. (SUMBER DANA APBD PROVINSI JAMBI TA 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan kajian efektifitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bantuan berupa Barang bagi pelaku usaha mikro di Provinsi Jambi, yang pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, serta merumuskan strategi kebijakan pemberian bantuan bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan barang tahun anggaran 2021. Selain analisis deskriptif juga dilakukan analisis dengan metode Mc Nemar dan metode Analytical Hierarchy Process, untuk rumusan rekomendasi didasarkan atas best practice dari penelitian dan kebijakan yang telah ada. Temuan penelitian membuktikan 95,10% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan selama Pandemi Covid-19, bantuan barang yang diberikan berpengaruh signifikan dan efektif dalam meningkatkan pendapatan dan produksi. Temuan selanjutnya bahwa 86,27% penerima bantuan tidak berharap program berupa barang/peralatan dilanjutkan, namun berharap bantuan berupa uang. Adapun strategi yang direkomendasikan dalam pemberian bantuan UMKM kedepannya adalah, melalui penyaluran dan pembayaran secara non-tunai.

Rekomendasi Kebijakan :

a. Berdasarkan analisis strategi diatas menunjukkan bahwa perlu ada perubahan kebijakan dalam pemberian bantuan bagi UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Dimana Penyaluran dan pembayaran bantuan dilakukan secara elektronik/non tunai hal ini akan memberikan dampak yang lebih baik. Namun dalam penerapan model ini harus ada dilakukan sosialisasi, diskusi dan persamaan persepsi di awal dari pihak terkait baik pemerintah daerah, penerima bantuan, UMKM mitra dan pihak perbankan, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bagi penerima bantuan akan lebih mudah, kemudian dapat memberikan dampak Multiplier Effect yang luas bagi para pelaku UMKM lain. Sedangkan rekomendasi dari beberapa best practice dan kajian penelitian serta peraturan yang ada, maka model pemberian bantuan elektronik/non tunai dengan mereplikasikan

sebagian konsep non tunai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Adapun Mekanisme Bantuan Non Tunai Pemerintah Provinsi Jambi yang direplikasikan mulai dari tahapan pengusulan, penyaluran, dan penggunaan dana. Adapun pihak yang terlibat secara aktif, yakni; UMKM Penerima Bantuan, UMKM Mitra Penerima, Perbankan sebagai Bank Penyalur, Pemerintah Provinsi Jambi sebagai pemberi bantuan. Dalam mekanisme penggunaan dana, walaupun telah disalurkan ke rekening penerima bantuan namun dalam penggunaannya pencairan dana hanya dapat dilakukan secara non-tunai (Cashless), baik melalui transfer antar rekening, sistem QRIS atau debet rekening dari rekening UMKM Penerima Bantuan ke Rekening UMKM Mitra Penerima. Secara rinci terlihat pada Gambar 1. Implikasi lain dari mekanisme ini, maka bantuan Pemerintah Provinsi Jambi dapat memberikan multiplier effect yang terukur bagi banyak pelaku UMKM di Provinsi Jambi, sistem elektronik juga memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan

2. Alternatif strategi pemberian bantuan bagi UMKM yang kedua adalah melalui bantuan dalam bentuk barang atau peralatan, sedangkan pemberian bantuan modal secara tunai merupakan alternatif strategi terakhir yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Apabila alternatif rekomendasi pemberian bantuan dalam bentuk barang atau peralatan yang dilakukan, maka perlu dilakukan survey pendataan kebutuhan barang/peralatan yang sangat dibutuhkan. Sehingga bantuan barang/peralatan yang diberikan dapat bermanfaat, berdaya guna, dan memberikan dampak bagi pengembangan usaha kedepannya. Apabila alternatif terakhir bantuan uang diberikan secara tunai dilakukan, maka perlu dilakukan pengawasan pertanggung jawaban secara konsisten dan tidak hanya dalam bentuk pelaporan penggunaan dana yang sudah disalurkan. Beberapa kajian sebelumnya telah membuktikan bahwa masyarakat atau pihak penerima bantuan usaha mikro cenderung akan melakukan penyalahgunaan dana untuk hal yang konsumtif, sehingga tidak produktif dan sesuai dengan tujuan bantuan untuk pengembangan usaha.

5. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN GEOPARK MERANGIN JAMBI MENUJU WARISAN DUNIA

Konsep UNESCO Global Geopark (UGG) adalah berupaya menawarkan peluang untuk mengembangkan, mengenalkan, dan melindungi situs warisan bumi ke tingkat global. Geopark dapat dimanfaatkan untuk mengenali kembali hubungan manusia dengan geologi yang menarik untuk penelitian, pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, karena selain mengandung keindahan dan kelangkaan, terdapat juga fenomena yang mengandung sejarah, kejadian dan proses pembentukan bumi. Keadaan ini berpeluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi baru. Geopark Merangin Jambi adalah salah satu Geopark

nasional yang berupaya untuk dapat diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). Kawasan Geopark Merangin Jambi terbentang melewati 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin dengan luas 4940,34 Ha atau sekitar 64% dari luas Kabupaten Merangin. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merangin Tahun 2020, Kawasan Geopark terdiri atas beberapa peruntukan, yakni sebagai kawasan hutan (lindung/produksi) seluas 52%, sebagai perkebunan seluas 28% dan sisanya merupakan lokasi keberadaan site-site inti Geopark.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Membangun wadah koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kab/Kota) dan Pemangku Kepentingan (OPD Terkait, Akademisi, Pihak Swasta, Komunitas dan Media) dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi terkait kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Integrasi dan Sinkronisasi pada dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran antar pemangku kepentingan/OPD terkait baik di tingkat Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota dengan kawasan terkait dengan pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di lokasi Geopark Nasional Merangin Jambi.
- c. Mengupayakan Geopark Nasional Merangin Jambi menjadi Kawasan Strategis Nasional sehingga Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk Policy Brief Balitbangda Provinsi Jambi 13 mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya lokal dan nasional dapat terjaga. Dan Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa dan masyarakat lokal.
- d. Menciptakan Kawasan Geopark Nasional Merangin Jambi menjadi area Cluster Ekonomi Kreatif Baru dengan mengeksplorasi potensi produk UMKM lokal baik dalam bentuk kerajinan, atraksi budaya dan kuliner khas masyarakat lokal sehingga dapat memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi pemberdayaan masyarakat.
- e. Dukungan Kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta (BUMN) sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam pengembangan Geopark Nasional Merangin Jambi terutama dari aspek penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDG's).

6. STRATEGI PEMANFAATAN LIMBAH PADAT KELAPA SAWIT DI PROVINSI JAMBI

Harga minyak sawit yang terus naik setiap tahun menyebabkan kebutuhan akan buah kelapa sawit pun tinggi. Produktivitas buah sawit yang tinggi dan luas areal kebun sawit bertambah. Hal ini menyebabkan peningkatan volume limbah sawit padat di kebun petani atau kelompok masyarakat. Di ikuti harga sawit yang tinggi menyebabkan petani sawit enggan mengolah limbah padat sawit. Mereka sudah cukup puas dengan harga Tandan Buah Sawit (TBS) segar sehingga mengabaikan limbah kelapa sawit padat yang berlimpah di areal perkebunan. Melimpahnya limbah sawit padat menjadi masalah tersendiri terutama bagi lingkungan. Namun banyaknya limbah perkebunan sawit di Provinsi Jambi memiliki dampak positif. Limbah sawit apabila dimanfaatkan dan diolah menjadi suatu produk oleh masyarakat akan memiliki nilai tambah. Perlu suatu kegiatan dan cara untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah padat sawit sehingga membuat masyarakat tertarik untuk ikut serta memanfaatkannya.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Memberikan bantuan stimulan inovasi teknologi pengolahan limbah padat kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan (*environmental friendly*) dan juga dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi (*economic benefit*). Teknologi ini dilakukan dengan cara menghasilkan produk baru yang dapat dijual kembali dengan memanfaatkan limbah padat kelapa sawit tersebut. Selain itu juga mudah dan murah dalam operasional pengelolaannya terutama bagi masyarakat.
- b. Menciptakan dan meningkatkan kesadaran terkait dengan kerangka kebijakan dan regulasi pada semua aktor dapat mendorong terjadinya peningkatan mekanisme pengaturan pengelolaan limbah padat kelapa sawit yang lebih efektif dengan membangun sistem yang dapat mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan limbah padat kelapa sawit. Sehingga, keberlanjutan kebijakan pada proses pengelolaan limbah padat kelapa sawit harus didukung dengan adanya perubahan yang mendasar pada mekanisme koordinasi antar stakeholder. Pemerintah harus menjamin dengan peraturan dan sanksi yang tegas jika limbah kelapa sawit tidak dikelola dengan baik. Perlu diciptakan suatu ruang koordinasi tersendiri untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak dan bahkan jika memungkinkan dapat memasukkan pihak swasta dalam program manajemen limbah padat kelapa sawit.
- c. Perlu adanya kebijakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat petani kelapa sawit tentang pemanfaatan limbah padat kelapa sawit melalui program pemberdayaan masyarakat tentang pengolahan limbah yang memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

7. IDENTIFIKASI POTENSI DAERAH DAN PENGEMBANGAN KOMODITAS SEKTOR BASIS MENUJU KAWASAN EKONOMI BARU SENTUSA

Pembangunan ekonomi pada daerah 3 (tiga) kawasan Tanjung Jabung Barat Tanjung Timur dan Muaro Jambi masih belum memaksimalkan, terutama pengembangan sektor primer ke pengembangan produksi sekunder. Kondisi saat ini masih menembatkan Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi, disusul Tanjung Jabung Barat. Sementara Kabupaten Muaro Jambi memiliki tingkat pengangguran terbuka ketiga terbesar di Provinsi Jambi. Secara potensi ketiga daerah ini memiliki sektor unggulan.

Potensi hasil-hasil perkebunan, pertanian dan perikanan memiliki peluang besar untuk pengembangan sektor sekunder. Pengembangan kawasan ekonomi baru (SENTUSA) merupakan terobosan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tiga daerah tersebut dan sebagai tiang penonggak memperkuat ekonomi kawasan tersebut sehingga mampu sebagai trigger atau memicu pertumbuhan ekonomi disekitarnya atau memberi dampak multiplier efek. Pengembangan kawasan SENTUSA menekankan pada pengolahan produk primer menuju produk sekunder dengan membangun industry pengolahan yang memberi peluang pada kinerja ekspor, merespon tumbuh investasi baik domestik maupun asing dan mendorong pertumbuhan berbagai aktivitas bisnis di segala sektor. Pembangunan industry pengolahan didukung oleh potensi komoditas unggulan yang menyediakan bahan baku secara berkelanjutan dan dekat dengan pengguna karena adanya peluang akses ekspor melalui pelabuhan laut.

Rekomendasi Kebijakan :

- a. Setiap Kabupaten menentukan arah Pengembangan komoditas unggulan ke sektor sekunder perlu membuat skala prioritas dari hasil-hasil perkebunan, pertanian dan perikanan berdasarkan pohon industry yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang akan menjadi ICON masing-masing kabupaten yang dikoordinir Badan Perencanaan Daerah.
- b. Pengembangan komoditas unggulan ke sektor sekunder harus memperhatikan hasil analisis SWOT dan menjalankan strategi, arah kebijakan, fokus kegiatan, keterlibatan kelembagaan dan dukungan provinsi yang tertera dalam road map (peta jalan), dalam hal ini perlu pembentukan tim persiapan daerah untuk mewujudkan tahapan-tahapan perencanaan pengembangan komoditas kesektor sekunder.
- c. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah membuat perencanaan yang mengarah pada rencana kegiatan SENTUSA (rencana strategi pada peta jalan) yang di perkuat oleh Badan Perencanaan Daerah Dan PUPR daerah yang disesuaikan dengan rencana tata ruang Provinsi Jambi.

- d. Masing-masing Kabupaten menggandeng Pihak SWASTA dan BUMN untuk berkolaborasi mewujudkan kawasan Ekonomi BARU SENTUSA terkait pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan, pertanian dan perkebunan
- e. Pengembangan Kawasan Industri harus berbasis penataan ruang yang disinkronisasikan pembangunan di Kabapten dan Provinsi
- f. Badan Perencanaan Daerah Provinsi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembinaan, dukungan, koordinasi dan sosialisasi tahapan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA ke Kabupaten yang menjadi daerah pengembangan kawasan ekonomi baru SENTUSA
- g. Perlu penelitian lebih lanjut terkait pembentukan kawasan indutri yang tepat yang dekat dengan bahan baku dan pelabuhan akhir

8. PENGELOLAAN PENYAKIT MATI MERANGGAS DUKU DI PROVINSI JAMBI (STUDI KASUS PADA VARIETAS UNGGUL DUKU KUMPEH DAN MUARO PANCO)

Duku Kumpeh dan Duku Muaro Panco telah menjadi ikon Provinsi Jambi yang bercita rasa manis, namun produktivitas duku di Provinsi Jambi menurun tajam akibat serangan penyakit mati meranggas yang disebabkan oleh jamur *Phytophthora palmivora*. Pada umumnya penyakit mati meranggas sangat merugikan, baik secara ekonomi, maupun dalam penurunan hasil produksi buah duku, bahkan menyebabkan kematian tanaman dalam waktu relatif singkat. Hal akan bermuara punahnya salah satu kekayaan plasma nutfah yang dimiliki Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui kondisi eksisting serangan penyakit mati meranggas pada duku Kumpeh dan duku Muaro Panco, 2) membahas respon petani duku terkait pengelolaan penyakit mati meranggas, 3) merumuskan strategi alternatif pengelolaan penyakit mati meranggas. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan observasi, wawancara dan FGD. Pemilihan wilayah penelitian dilakukan secara purposive yaitu 3 desa di Kecamatan Kumpeh Ulu dan 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan program Microsoft excel 2016. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, respon petani digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan skala Likert, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi serangan penyakit mati meranggas di Kecamatan Kumpeh Ulu pada 3 desa sebesar 56,66%, sementara 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap sebesar 99%. Respon petani terkait pengelolaan penyakit mati meranggas baik 3 desa di Kecamatan Kumpeh Ulu maupun 2 desa di Kecamatan Renah Pembarap berada pada kategori rendah. Rekomendasi penelitian adalah membuat rencana aksi program pencegahan dan pengelolaan penyakit mati meranggas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan :

Rekomendasi penelitian adalah membuat rencana aksi program pencegahan dan pengelolaan penyakit mati meranggas, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- a. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam jangka waktu pendek antara lain : 1. Dinas TPHP Provinsi Jambi mendorong adanya surat edaran terkait darurat penyakit mati meranggas duku di wilayah sentra produksi duku; 2. Kepala Desa mengusulkan dan mendorong adanya payung hukum menggunakan dana desa untuk kegiatan prioritas duku -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 S W O T Kuadran II, ST Kuadran I, SO Kuadran III, WO Kuadran III, WO Strategi Diversifikasi Policy Brief Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi 9; 3. Petani melakukan pengendalian secara preventif/ fokus menyelamatkan tanaman duku yang belum terserang dengan melakukan pengendalian penyakit secara intensif melalui aplikasi bubur bordo, pemupukan, dan sanitasi lingkungan; 4. Dinas TPHP Provinsi/Kabupaten melakukan sosialisasi/advokasi kepada TAPD dan Banggar DPRD terkait anggaran untuk pencegahan penyakit duku; 5. Melakukan rehabilitasi dengan menyediakan area kebun khusus/demplot termasuk lahan, bibit sambung pucuk, pupuk dan alsintan yang diawasi oleh Pengendali Hama Penyakit dengan catatan diberikan kompensasi; 6. Petani melakukan eradikasi pada tanaman terserang berat, diawasi oleh Petugas Pengendali Hama Penyakit; 7. Balai Benih Induk menyediakan bibit sambung pucuk dan melaksanakan bimtek kepada petani untuk membuat bibit sambung pucuk; 8. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa, akademisi dan praktisi untuk melaksanakan kajian epidemis secara teknis dan komprehensif; 9. Dinas TPHP kabupaten membentuk atau mengaktifkan kembali wadah/forum petani peduli duku; dan 10. Komitmen tegas sistematis dan terarah dari pihak pemangku kepentingan dengan rencana aksi pengendalian terus berlanjutnya penyebaran penyakit.
- b. Sementara rencana aksi Jangka Panjang adalah : 1. Melakukan replanting tanaman duku dan penanaman tanaman sela yang cepat panen; 2. Memberikan kompensasi biaya eradikasi per batang; 3. Melakukan Pemuliaan tanaman untuk menyelamatkan plasma nutfah duku sebagai sumberdaya genetik loka; dan 4. Meningkatkan SDM Pengendali Hama Penyakit (PHP) dan PPL melalui bimtek penyakit mati meranggas.

Lampiran 5.

Hasil Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2022

1. FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Pada dasarnya konsep tentang HKI bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. HKI juga adalah sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.

Daftar HKI yang difasilitasi oleh Balitbangda Provinsi Jambi pada Tahun 2022

NO	WILAYAH PROV/KAB/KOTA	PEMOHON	FASILITATOR	JENIS KI	NAMA PRODUK/ BARANG KI	TH.	KET.
1	Kab. Tanjung Jabung Barat	Siti Rahmawati	Balitbangda Provinsi Jambi	Hak Cipta	Motif Batik Udang Agogo	2022	Bersertifikat
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	Putriana	Balitbangda Provinsi Jambi	Hak Cipta	Motif Batik Cincinut	2022	Bersertifikat
3	Kab. Tanjung Jabung Barat	Hj. Fadhilah	Balitbangda Provinsi Jambi	Hak Cipta	Motif Batik Rehal/Tunjuk Ngaji	2022	Bersertifikat
4	Kab. Tanjung Jabung Barat	Hadrawi	Balitbangda Provinsi Jambi	Hak Cipta	Motif Batik Pucuk Jeruju	2022	Bersertifikat
5	Kab. Tanjung Jabung Barat	Mardiana	Balitbangda Provinsi Jambi	Hak Cipta	Motif Batik Pak Tani	2022	Bersertifikat
6	Kab. Merangin	Patimah Tuhuriah	Balitbangda Provinsi Jambi	Merek	Kopi Bubuk 3M	2022	Sudah Terdaftar

7	Kab. Merangin	Khairil	Balitbangda Provinsi Jambi	Merek	Ayam Geprek Bunda Faa	2022	Sudah Terdaftar
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	MPIG Pinang Betara Jambi	Balitbangda Provinsi Jambi	Indikasi Geografis	Pinang Betara Tanjab Barat Jambi	2022	Dalam Proses
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	MPIG Pinang Betara Jambi	Balitbangda Provinsi Jambi	Kekayaan Intelektual Komunal	Pinang Betara Jambi	2022	Bersertifikat
10	Kab Muaro Jambi	MPIG Nanas Tangkit Jambi	Balitbangda Provinsi Jambi	Kekayaan Intelektual Komunal	Nanas Tangkit Jambi	2022	Bersertifikat

2. LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) yang ke 27 Tahun 2022 merupakan hari bersejarah nasional yang diperingati setiap 10 Agustus berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1995. Hakteknas diperingati untuk menghargai keberhasilan putra-putri Indonesia dalam memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta untuk memberi dorongan kepada mereka untuk senantiasa membangkitkan daya inovasi dan kreasi guna kesejahteraan dan peradaban bangsa Indonesia dan menanamkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai strategis dan urgensi IPTEK itu sendiri. Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) ini merupakan momentum bagi kita untuk mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dalam Pengembangan Potensi Ekonomi kerakyatan khususnya di Provinsi Jambi. Melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah (KTI) memberikan ruang dan kesempatan bagi Mahasiswa/i untuk berpartisipasi mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) melalui ide kreatif dan fikiran untuk berinovasi sehingga menjadi generasi muda yang dapat diandalkan dan diperhitungkan.

Tema Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah : ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui SDM Berkualitas dan Pengembangan Potensi Ekonomi Povinsi Jambi”***.

Pemenang lomba

Pemenang Lomba berdasarkan penilaian Tim Juri KTI untuk masing-masing kategori, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 829/KEP-GUB/BALITBANGDA/4.3/IX/2022, tanggal 22 September 2022, tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022, sebagai berikut :

Pemenang	Judul Karya Tulis	Nama Peserta	Asal Peserta	Nilai
Pertama Juara I	<i>Nanoelmusi Red Palm Oil</i> Sebagai <i>Drug Delivery System</i> Imunomodulator dalam Upaya Pemanfaatan Potensi Kelapa Sawit di Provinsi Jambi.	1.Azzahara Oktafiami 2.Cindy Rilyan Sari 3.Risma Putri Tians	Universitas Jambi	13.056,2
Kedua Juara II	Haiking (<i>Hormon Hipofisa Kepala Kambing</i>) Inovasi Teknologi Hormon Pemijahan Ikan Air Tawar.	1.Aisah Ahmad 2.Risma Dilla Marhaini	Universitas Jambi	12.972,9
Ketiga Juara III	Perancangan Gawangan Roll yang Ergonomis Sebagai Sarana Efisien bagi Pengrajin Batik Tulis.	1.M.Ilham 2.M.Aldi Azhara 3.Junaidi Trisno	Stiteknas Jambi	12.910,6
Keempat Harapan I	Minifarm (Mini Farming System) Inovasi Program Urban Farming Berbasis Zero Waste Agriculture Menuju Ketahanan Pangan.	1.Taufiq Natogu 2.Muhammad Rizky Ramadhan 3.Ahwa Eko Prasatyio	Universitas Jambi	12.796,7
Kelima Harapan II	Inovasi Alat Pengering Buah Pinang (<i>Areca Catechu</i>) dengan Memanfaatkan Energi Surya Untuk Meningkatkan Komoditi Buah Pinang Di Provinsi Jambi.	1.Apryanto 2.Aldo Tri Ilham ZK 3.Khoirul Huda	Universitas Jambi	12.795,2
Keenam Harapan III	Diseminasi Bakuldeso Berbasis <i>E-Commerce</i> Pada UMKM <i>Ecoenzyme</i> Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi.	1.Nissa.F 2.Zulfa Malika Amana 3.Febria Lestari	UIN STS Jambi	12.756,1

3. LOMBA INOVASI DAERAH ANTAR OPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai bentuk, yaitu : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah tidak harus selalu dalam bidang sistem informasi dan teknologi (IT) serta perizinan; dapat pula dalam tata

kelola, kerja sama, dan optimalisasi sumber pendanaan. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Masyarakat, agar lebih optimal sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah hadir menjadi dasar *legal framework* dalam implementasi inovasi daerah, dimana perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan diamanatkan untuk menjadi pendorong pertumbuhan inovasi daerah mengingat lembaga litbang memiliki fungsi strategis yang bertugas melakukan verifikasi dan evaluasi usulan inovasi daerah. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 8 mengamanatkan bahwa Penelitian dan Pengembangan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana hasil dari penelitian dan pengembangan diharapkan dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemenang Lomba/Pengukuran Indeks Inovasi Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi :

No.	Nama OPD	Indeks / Skor	Kategori/ Predikat	Juara
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	63,61	Sangat Inovatif	Juara I
2.	Balitbangda Provinsi Jambi	62,17	Sangat Inovatif	Juara II
3.	RSUD Raden Mattaher Jambi	60,42	Sangat Inovatif	Juara III
4.	Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi	56,39	Inovatif	Juara Harapan I
5.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi	50,09	Inovatif	Juara Harapan II
6.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	48,93	Inovatif	Juara Harapan III

Pemenang Lomba/Pengukuran Indeks Inovasi Daerah antar Pemerintah Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jambi.

No.	Nama Kabupaten/Kota	Indeks / Skor	Kategori/ Predikat	Juara
1.	Kota Jambi	86,98	Terinovatif	Juara I
2.	Kabupaten Kerinci	51,40	Inovatif	Juara II
3.	Kabupaten Sarolangun	42,98	Inovatif	Juara III
4.	Kabupaten Tanjab. Barat	39,98	Inovatif	Juara Harapan I
5.	Kabupaten Merangin	39,06	Inovatif	Juara Harapan II
6.	Kota Sungai Penuh	38,54	Inovatif	Juara Harapan III

4. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

Melaksanakan amanat Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota. Hasil Pengukuran IPKD untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.



GUBERNUR JAMBI

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1020/KEP.GUB/BALITBANGDA-1.1/2022**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berdasarkan hasil penilaian Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2022 yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 830/KEP.GUB/BALITBANGDA/2022, perlu menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 November 2022

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 1020/KEP.GUB/BALITBANGDA-1.1/2022
 TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

A. Kota Se-Provinsi Jambi Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

NO	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kota Jambi	4.0384	18.9655	6.9828	13.3333	3.8388	15	62.1588	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								68.4047		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								10.9805		

B. Kota Se-Provinsi Jambi Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kota Sungai Penuh	3	19.4828	6.7241	15	5.8689	15	65.0758	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL								61.4150		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								11.4030		

C. Kabupaten Se-Provinsi Jambi Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kabupaten Batang Hari	8.0634	18.1034	10.0862	15	3.5641	15	69.8172	Perlu Perbaikan	B
2.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2.2211	18.4483	0	15	5.9570	15	56.6263	Perlu Perbaikan	B
3.	Kabupaten Muaro Jambi	1.9073	13.7931	0	10	5.1231	15	45.8236	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA NASIONAL								64.1932		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								10.7087		

D. Kabupaten Se-Provinsi Jambi Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	12.0515	19.4828	13.7069	15	5.2608	15	80.5020	Baik	A
2.	Kabupaten Tebo	12.1929	19.3103	8.2759	15	4.7771	15	74.5562	Perlu Perbaikan	B
3.	Kabupaten Sarolangun	10.4380	18.7931	6.7241	15	5.8288	15	71.7840	Perlu Perbaikan	B
4.	Kabupaten Kerinci	1.8068	15.8621	0	15	4.8327	10.0050	47.5066	Sangat Perlu Perbaikan	C
5.	Kabupaten Bungo	2.1579	18.7931	0	10	5.4021	10.0050	46.3581	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA NASIONAL								61.9804		
STANDAR DEVIASI NASIONAL								13.7259		

E. Kabupaten Se-Provinsi Jambi yang Tanpa Predikat Dengan Keterangan Eliminasi Dimensi 5

NO	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI
1.	Kabupaten Merangin	6.8718	18.2759	4.1379	15	0	15	59.2856	Tidak Ada Predikat

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

5. LOMBA INOVASI PRODUK DAERAH (IPDA) TAHUN 2022

Inovasi dapat diperoleh melalui *discovery* (penemuan), invensi (penciptaan, perancangan) maupun pembaharuan suatu produk dengan metode atau cara yang baru. Sehingga inovasi dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Kemudian pengaplikasian inovasi dapat dibedakan pula dalam tiga bentuk, yakni: inovasi produk (*product innovation*), inovasi dalam pelayanan (*service innovation*) dan inovasi proses (*process innovation*). Inovasi produk merupakan pemunculan produk baru. Inovasi pelayanan adalah cara baru dalam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Sedangkan inovasi proses adalah sebuah cara baru untuk membuat proses dalam menghasilkan produk atau jasa menjadi lebih ekonomis.

Guna menstimulasi iklim yang kondusif dalam rangka peningkatan inovasi di kalangan pelajar SLTA, mahasiswa, dan masyarakat umum di Provinsi Jambi, maka Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Produk Daerah (IPDa). Dengan tema yang diusung pada Lomba Inovasi Produk Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 ini yaitu, *“Meningkatkan Daya Saing Komoditi Nanas dan Pinang melalui Pendekatan Kreativitas, Inovasi dan Teknologi di Provinsi Jambi”*.

Penuh harapan agar kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kemandirian masyarakat di Provinsi Jambi, serta mendorong kreatifitas dan inovasi dalam membangun industri kreatif.

Acara Final dan Presentasi Nominator Lomba Inovasi Produk Daerah dilaksanakan pada Tanggal 2 Juni 2022 di Aula Kantor Balitbangda Provinsi Jambi. Sebanyak 26 Tim menjadi nominator berkompetisi untuk memperebutkan Juara I, II, dan III, serta Juara Harapan I, II, dan III dari masing-masing kategori. Pemenang yang dinobatkan pada acara Final Lomba Inovasi Produk Daerah sebagai berikut :

a. Masyarakat Umum

Pemenang	Nama Inovator	Inovasi	Alamat
Juara I	Bustam Efendi	Cream Batik (Sabun Batik)	Kabupaten Bungo
Juara II	Dr. Wahyu Saputra, Dr. Ghozi Fadlul Ramadha	Pengolahan Kulit Nanas Menjadi Keripik Sehat	Jl. Syailendra No.113 Kota Jambi
Juara III	Dr. Wahyu Saputra, Falih Gumilang	Manisan Kering Bona (Bongol Nanas)	Jl. Syailendra No. 113 Kota Jambi
Juara Harapan I	Hadrawi	Buah Pinang Pewarna Batik Printing	Jl. Manunggal II Perumahan Harapan Lestari, Kuala

			Tungkal Barat Kab. Tanjab Barat
Juara Harapan II	Reni Oktaviani, Frima Aulia Rizda, Fatijah	Sambal Nanas Kemasan	Perumahan Kebun Kulim No. 3, Kampung Sejati, Tangkit, Muaro Jambi
Juara Harapan III	Endang Fitriana, Meri Agustin, Shakti Alam S. Nur	Jekenas (Jelly Kelor Nanas)	Jln. Orang Kayo Hitam Muara Bulian Kab. Batanghari

b. Perguruan Tinggi

Pemenang	Nama Inovator	Inovasi	Asal PT
Juara II	Syamsuri, Rasid Sidik, M. Ravid Hudaya	Mesin Pembelah Buah Pinang Otomatis	Politeknik Jambi
Juara II	Harmuna Sulistia, Qomariyah	Inovasi Pengolahan Limbah Upih Pinang Menjadi Wallpaper Aesthetic	Universitas Jambi
Juara III	Muhammad Said, Sunan Sarif Hidayatullah	Alat Bantu Pembelah Pinang	Universitas Jambi
Juara Harapan I	Abu Baharudin, Indo Saputra, Putra Maruli Tua Sianipar	Mesin Pengupas Buah Pinang Kering Sistem Thereser	Politeknik Jambi
Juara Harapan II	Nikmatul Fadhilah, Yunita Puspita Dewi, Renggi Putra Pratama	Dora-Kun : Deodoran Alami Kulit Buah Nanas	Universitas Jambi
Juara Harapan III	Adam Al Fatah, Perni Juliansih, Cici Rahmadani, Mince Lestari, Richi Dwiardiansyah	Bobanas (Boba Nanas)	Universitas Jambi

c. Pemenang Kategori SLTA sederajat

Pemenang	Nama Inovator	Inovasi	Asal Sekolah
Juara I	Boy Sandy, Dewi Agustin Halawa	Anti bakterial penghilang noda pakaian dari ekstrak biji pinang	SMA Negeri 3 Kab. Tanjab Barat
Juara II	Alif Rahmat Ananta	Aplikasi Nasang	SMA Negeri 3 Jambi
Juara III	Mia Nur Habibah, Mia Nur Habibah, Zefanya Octaflorens N.	Teh Kulnare Yang Kaya Manfaat	SMA Negeri 8 Jambi
Juara Harapan I	Astri Alfitri	Haice De Nas (Health Of Ice De Nanas)	SMK PP Negeri Jambi
Juara Harapan II	Rivia As Aulia, Mirda Anisa Putri, Fadhil Akbar Elizabet Rafflesia Choagolan, Sertika Handayani Marbun, Zahriana Putri	Cookies Pinang (Batle Nut Cookies Yrc)	SMA Negeri 12 Merangin

6. KEGIATAN *JAMBI INNOVATION WEEK* PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam berbagai bentuk, yaitu : Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi daerah tidak harus selalu dalam bidang sistem informasi dan teknologi (IT) serta perizinan; dapat pula dalam tata kelola, kerja sama, dan optimalisasi sumber pendanaan. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Masyarakat, agar lebih optimal sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Rangkaian kegiatan *Jambi Innovation Week* Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- (a) Sosialisasi akan dilaksanakannya *Jambi Innovation Week* Provinsi Jambi Jambi Tahun 2022 yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan beberapa pihak instansi vertikal serta BUMN di Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2022 di Aula Balitbangda Provinsi Jambi .
- (b) Persiapan dan Pemantapan Pameran Inovasi dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022
- (c) Pelaksanaan *Jambi Innovation Week* dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Mall WTC Batanghari Jambi.

Kegiatan ini bermaksud untuk memberikan wadah dan penghargaan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat Jambi baik secara individu maupun kelompok, sebagai penemu atau pengembang inovasi dan teknologi pengolahan produk unggul daerah sedangkan tujuannya adalah untuk :

- a) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya kreatif serta inovatif, dalam penerapan teknologi yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat;
- c) Mendorong terciptanya produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.
- d) Meningkatkan dan Memperkuat jejaringan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) antara masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah dan dunia usaha.

7. SOSIALISI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 38 TAHUN 2020 TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (IKKD)

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah. Pemerintah Pusat menyusun indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun untuk bahan evaluasi.

Indeks dan peringkat kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun setiap tahun oleh Menteri. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Maksud diadakannya kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) adalah Kepala daerah memiliki peran penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepemimpinan Kepala Daerah ikut serta dalam menentukan keberhasilan tujuan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari Sosialisasi ini adalah :

- a. Mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah.
- e. Memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

8. PERINGATAN HARI KRIDA PERTANIAN (HKP) KE-50 TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 (PENILAIAN PENGHARGAAN TOKOH BIDANG PERTANIAN)

Hari Krida Pertanian merupakan hari besar peringatan pertanian yang dirayakan oleh seluruh masyarakat pertanian di Indonesia, termasuk petani, peternak, nelayan, hingga pegawai dan pengusaha yang bekerja di sektor pertanian. Hari Krida Pertanian juga menjadi waktu untuk mengevaluasi kekurangan dari kegiatan pertanian yang sudah lalu untuk diatasi dan dicegah pada kegiatan pertanian selanjutnya. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai produsen komoditas, pemenuhan tenaga kerja, hingga penyumbang devisa. Maka, perayaan Hari Krida Pertanian diharapkan menjadi momen masyarakat dan petani untuk mendorong aktivitas produksi dan perbaikan terhadap ekonomi nasional. Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Penghargaan Tokoh Bidang Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) adalah untuk memberikan motivasi kepada petani sebagai pelaku utama guna meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam mengelola usaha Pertanian di Provinsi Jambi.

HASIL PENILAIAN PENGHARGAAN TOKOH BIDANG PERTANIAN

No	Aspek Yang Dinilai	Variabel	Bobot	Skor	NILAI							
					Ma. Jbi	BTH	TJT	Tebo	Bun go	MRG N	KRC	SPN
1	Organisasi	Kedudukan Dalam Kelembagaan Petani a. Sebagai Pembina/Penasihat b. Sebagai Pengurus Harian c. Sebagai Anggota	100	91 -100 81 – 90 71 - 80	88	85,7	94	90	80	100	100	100
2	Jenis Inovasi	a. Sangat Rumit Ditiru Orang	150	91 - 105 106 – 120	145	141,7	145,7	100	150	150	135	120
		b. Rumit Ditiru Orang	200	121 – 135 136 – 150				180				
		c. Mudah Ditiru Orang	200	150 – 165 166 – 170 171 – 185 186 - 200	193	190	196,7	180	200	200	185	170
		d. Sangat Mudah Ditiru Orang										
		Efisiensi dan Efektifitas Sebuah Inovasi										
		a. Sangat Rendah										
		b. Rendah										
		c. Tinggi										
		d. Sangat Tinggi										
3	Penghargaan Yang Diperoleh	Penghargaan Yang pernah Diperoleh	100	80 90 100	-	-	-	80	-	100	-	-
		a. Umum	150									
		- Tingkat Kabupaten/Kota		100 125 150	150	150	100	150	125	150	125	-
		- Tingkat Provinsi										
		- Tingkat Nasional										
		b. Bidang Pertanian/Perikanan/Kehutanan										
		- Tingkat Kabupaten/Kota										
		- Tingkat Provinsi										
		- Tingkat Nasional										

No	Aspek Yang Dinilai	Variabel	Bobot	Skor	NILAI															
					M.Jbi	BTH	TJT	Tebo	Bun go	MRG N	KRC	SPN								
4	Penerima Manfaat Ketokohan	Penerima Manfaat Terhadap Kegiatan Pertanian yang dilakukan	150	110 120 130 140 150	150	143,3	146,7	150	140	150	150	110								
		a. Kelompok Tani/Perikanan / Kehutanan	150	110 120 130 140 150																
		b. Gapoktan/Gapokan/Gapok Kehutanan	150	110 120 130 140 150									140	120	126,7	140	130	140	140	130
		c. Asosiasi Tingkat Kecamatan	150	110 120 130 140 150																
		d. Asosiasi Tingkat Kabupaten	150	110 120 130 140 150																
		e. Asosiasi Tingkat Provinsi	150	110 120 130 140 150																
		Keberlanjutan Usaha	150	110 120 130 140 150	140	120	126,7	140	130	140	140	130								
		a. Tingkat Desa/ Kecamatan	150	110 120 130 140 150																
		b. Tingkat Kabupaten	150	110 120 130 140 150																
		c. Tingkat Provinsi	150	110 120 130 140 150																
d. Tingkat Nasional	150	110 120 130 140 150																		
e. Internasional	150	110 120 130 140 150																		
		- Pelaku Ekspor	150	110 120 130 140 150																
		- Fasilitas Ekspor	150	110 120 130 140 150																
TOTAL			1000		866	830,7	809,7	870	825	990	835	630								

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program serta Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kelompok Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
									Target	Rp	Target	Rp										
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Kajian Penelitian, Pengembangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Ketersediaan Hasil Kajian Kelitbangan, Penerapan IPTEK dan Inovasi untuk dimanfaatkan sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi	Nilai AKIP	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP		BB Predikat	BB Predikat	12.084.630.000	BB Predikat	12.295.500.000	BB Predikat	13.168.750.000	BB Predikat	14.022.000.000	BB Predikat	14.345.250.000	BB Predikat	65.916.130.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Balitbangda	Balitbangda Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota dan Instansi Terkait	100%	100%	525.000.000	100%	590.000.000	100%	660.000.000	100%	730.000.000	100%	800.000.000	100%	3.305.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	JAMBI
				5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Balitbangda Provinsi Jambi (Dokumen)		3	7	325.000.000	7	340.000.000	7	360.000.000	7	380.000.000	7	400.000.000	35	1.805.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD(Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	10	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		7	8	90.000.000	8	95.000.000	8	100.000.000	8	105.000.000	8	110.000.000	40	500.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000		
				5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi keuangan Perangkat	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	8.985.000.000	100%	9.290.000.000	100%	9.495.000.000	100%	9.700.000.000	100%	9.905.000.000	100%	47.375.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		NA	50	8.900.000.000	55	9.200.000.000	60	9.400.000.000	65	9.600.000.000	70	9.800.000.000	300	46.900.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		NA	30	85.000.000	33	90.000.000	36	95.000.000	39	100.000.000	41	105.000.000	179	475.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	76.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	426.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		2	2	76.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	10	426.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	162.250.000	100%	185.500.000	100%	208.750.000	100%	232.000.000	100%	305.250.000	100%	1.093.750.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya (Paket)		NA	1	42.250.000	1	45.500.000	1	48.750.000	1	52.000.000	1	55.250.000	5	243.750.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		8	12	120.000.000	14	140.000.000	16	160.000.000	20	180.000.000	25	250.000.000	87	850.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	785.000.000	100%	855.000.000	100%	925.000.000	100%	995.000.000	100%	1.065.000.000	100%	4.625.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		NA	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	5	125.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	2	150.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	250.000.000	10	1.000.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		0	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	5	125.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		NA	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		NA	2	45.000.000	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	10	275.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)		NA	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5	100.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat-Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)		50	40	420.000.000	45	440.000.000	50	460.000.000	55	480.000.000	60	500.000.000	250	2.300.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)		NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	525.000.000	100%	130.000.000	100%	490.000.000	100%	825.000.000	100%	560.000.000	100%	2.530.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 2)		0	2	400.000.000	0	0	0	350.000.000	5	125.000.000	2	400.000.000	9	1.275.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit kendaraan roda 4)		1	1		0	1		0	1		3					
				5.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	0	0	0	1	550.000.000	0	0	0	1	550.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)		0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	5	200.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)		0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	12	45.000.000	16	45.000.000	20	50.000.000	24	55.000.000	28	60.000.000	100	255.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	410.000.000	100%	485.000.000	100%	560.000.000	100%	635.000.000	100%	710.000.000	100%	2.800.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		0	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	60	250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		0	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	60	1.250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	2	220.000.000	2	240.000.000	2	260.000.000	2	280.000.000	2	300.000.000	10	1.300.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Seluruh ASN lingkup Balitbangda Provinsi Jambi, Sarana Prasarana Balitbangda Provinsi Jambi dan Instansi Terkait	100%	100%	616.380.000	100%	680.000.000	100%	745.000.000	100%	815.000.000	100%	905.000.000	100%	3.761.380.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara dan Dibayarkan Pajaknya (unit)		23	20	305.380.000	23	310.000.000	23	315.000.000	24	320.000.000	29	350.000.000	119	1.600.380.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		0	4	136.000.000	4	140.000.000	4	145.000.000	4	155.000.000	5	160.000.000	21	736.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)		30	30	25.000.000	30	30.000.000	30	35.000.000	30	40.000.000	30	45.000.000	150	175.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)		1	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	5	1.250.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/ model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau Pihak Lainnya	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya		50%	60%	6.302.300.000	65%	7.548.750.000	70%	7.569.600.000	75%	7.580.070.000	80%	8.590.070.000	80%	37.590.790.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan Perangkat Daerah atau pihak lainnya pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.580.000.000	65%	1.855.000.000	70%	1.857.500.000	75%	1.865.000.000	80%	2.120.000.000	80%	9.277.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)		0	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)		0	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000		
				5.05.02.1.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.12	Pengelolaan Data Kelitban dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitban dan Peraturan yang Dikelola (Dokumen)		-	8	50.000.000	8	55.000.000	8	57.500.000	8	65.000.000	8	70.000.000	40	297.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)		0	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		0	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Sosial dan Kependudukan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.660.000.000	65%	1.980.000.000	70%	1.985.000.000	75%	1.980.000.000	80%	2.255.000.000	80%	9.860.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	900.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.02.09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.02.11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder dan Masyarakat	50%	60%	1.885.000.000	65%	2.340.000.000	70%	2.340.000.000	75%	2.340.000.000	80%	2.665.000.000	80%	11.570.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)		-	1	200.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	945.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.09	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)		-	1	15.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	760.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	

				5.05.02.1.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)		-	1	160.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	905.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)		-	1	150.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	205.000.000	5	895.000.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
		Meningkatnya Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi Daerah untuk Mendukung Daya Saing Daerah	Indeks Inovasi Daerah	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Litbang Kab/Kota, Stakeholder, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	NA	60%	1.177.300.000	65%	1.373.750.000	70%	1.387.100.000	75%	1.395.070.000	80%	1.550.070.000	80%	6.883.290.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.01	Penelitian dan Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)		0	2	200.000.000	2	250.000.000	1	253.000.000	1	254.500.000	1	310.000.000	7	1.267.500.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)		0	5	400.000.000	5	410.000.000	5	415.000.000	5	416.570.000	5	450.000.000	25	2.091.570.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)		0	3	250.000.000	3	289.575.000	3	290.000.000	3	291.500.000	3	300.070.000	15	1.421.145.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan (Laporan)		3	3	227.300.000	3	277.000.000	3	279.100.000	3	280.000.000	3	320.000.000	15	1.383.400.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
				5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)		0	1	100.000.000	1	147.175.000	1	150.000.000	1	152.500.000	1	170.000.000	5	719.675.000	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	
					JUMLAH					18.386.930.000		19.844.250.000		20.738.350.000		21.602.070.000		22.935.320.000		103.506.920.000		

